



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayahNya jualah sehingga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta parallel dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Sinjai semua pihak sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan dimasa dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini. Semoga Allah, SWT memberikan balasan yang setimpal.

Sinjai, Juli 2017

Kepala Dinas,



Andi Adeha Syamsuri, AP, S.IP,M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19750105 199311 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	6
I.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	10
TRIWULAN II TAHUN 2014	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM	22
PERUBAHAN RENJA SKPD	
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan Perangkat Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan Pembangunan daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai dapat memberikan kepastian, kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 581 Tahun 2016 memuat Implementasi Program dan Kegiatan yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan sendirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas dan tanggung jawab, agar proses pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis, dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi dan misi kabupaten Sinjai seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mencapai strategi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);

27. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
29. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 34);
31. Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2017 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, propinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan engacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun kedua.

2. Agar program dan kegiatan tipa tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggungjawab.
4. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukurnya tingkat capaian kinerja.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas 8 (delapan) Program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Sebagai tahun Keempat dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013-2018, perlu dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan selama ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2017, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017
KABUPATEN SINJAI**

**SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) 2018		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016		TARGET KINERJA RENJA 2017	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2017		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2017				
													REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI TARGET	REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)			
1						2	3	4		5		6		7	8=7/6	9=5+7	10=9/4		
1	1 6	2				Urusan Penanaman Modal													
1	1 6	2	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terpenuhi												
1	1 6	2	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	1	6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	48	Unit	24	Unit	9	Unit	8	Unit	0,89	32	Unit	66,67
1	1 6	2	1	8		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	1	2		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00

1	1 6	2	1	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	1	1 9	Penyediaan jasa administrasi kesekretariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	1	2 0	Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	1	2 2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	2		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi												
1	1 6	2	2	9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	32	Unit	21	Unit	9	Unit	9	Unit	1,00	30	Unit	93,75
1	1 6	2	2	1 0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	17	Unit	16	Unit	11	Unit	11	Unit	1,00	27	Unit	158,82
1	1 6	2	2	2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	49	Unit	29	Unit	9	Unit	10	Unit	1,11	39	Unit	79,59
1	1 6	2	2	2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	50	Unit	20	Unit	10	Unit	10	Unit	1,00	30	Unit	60,00
1	1 6	2	2	2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	84	Unit	16	Unit	20	Unit	9	Unit	0,45	25	Unit	29,76
1	1 6	2	2	1 3	Pengadaan Instalasi air/listrik	Jumlah instalasi yang diadakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0,00	2	Unit	200,00
1	1 6	2	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan												
1	1 6	2	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	95	Orang	45	Orang	30	Orang	0	Orang	0,00	45	Unit	47,37
1	1 6	2	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	98	Orang	48	Orang	27	Orang	0	Orang	0,00	48	Orang	48,98
1	1 6	2	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas												
1	1 6	2	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan bimtek	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD												

1	1 6	2	6	1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD	4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1,00	3	Laporan	75,00
1	1 6	2	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	3	Laporan	60,00
1	1 6	2	6	9	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25	Dokumen	11	Dokume n	8	Dokume n	1	Dokume n	0,13	12	Dokume n	48,00
1	1 6	2	1 5		Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Investasi												
1	1 6	2	1 5	8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	laporan hasil peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0,5	Laporan	0,50	3,5	Laporan	70,00
1	1 6	2	1 5	1 0	Penyelenggaraan pameran investasi	jumlah potensi investasi yang dipromosikan dalam pameran	17	event	9	event	3	event	2	event	0,67	11	event	64,71
1	16	2	15	13	Bimbingan Teknis penyusunan LKPM	Penyelenggaraan bimbingan teknis	3	kali	1	kali	1	kali	0	kali	0,00	1	kali	33,33
1	1 6	2	1 6		Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi												
1	1 6	2	1 6	1 2	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	Updating Data SIPID dan SPIPISE	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	18	Bulan	50,00
1	1 6	2	1 6	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0,50	42	Bulan	70,00
1	1 6	2	1 8		Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik	Jumlah penyerahan ijin												
1	1 6	2	1 8	1	Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	640 0	Orang	552 5	Orang	135 0	Orang	81 2	Orang	0,60	633 7	Orang	99,02
1	1 6	2	1 8	4	Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	300	%	100	%	50	%	0,50	350	%	350,00
1	1 6	2	1 8	6	Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi	675	Orang	525	Orang	100	Orang	0	Orang	0,00	525	Orang	77,78
1	1 6	2	1 8	1 0	Fasilitasi Kebijakan di bidang perizinan	Jumlah Peraturan Bupati Sinjai Yang Disusun	3	Laporan	0	Laporan	2	Perbup	2	Perbup	1,00	2	Pebup	66,67

Berdasarkan data hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan II Tahun 2017, sebagian telah terlaksana sesuai dengan output (keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerja rencana kerja sampai dengan triwulan II ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya, namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan fisik kegiatan yang akan selesai pada triwulan III dan triwulan IV pada tahun berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh pelaksana kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sinjai.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan:
 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 3. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan.
- f. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:
1. Seksi Data dan Pelaporan;
 2. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- g. Jabatan Fungsional

Adapun Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI

N O	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATAT AN ANALIS IS
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	12	13
	Nilai Investasi PMDN dan PMA		Jumlah Investasi yang dihasilkan	PMA/PMDN = 332	PMA/PMDN = 342	PMA/PMDN = 373	PMA/PMDN = 388	PMA/PMDN = 937	PMA/PMDN = 580	PMA/PMDN = 909	PMA/PMDN = 501	
		Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Laporan hasil pengembangan potensi unggulan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Laporan hasil pemantauan, pembina an, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	1 Kali				1 Kali				
		Terselenggaranya Promosi peluang Penanaman Modal Kabupaten	Penyelenggaraan Pameran Investasi	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 4 event	
		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	1 kali	1 kali			1 kali	1 kali		1 Kali/ 50 Orang	
			Penyelenggaraan Bimtek			1 Kali/50 org	1 Kali			1 Kali/50 org	1 Kali/50 org	
			Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai								1 Laporan	
	Nilai Investasi PMDN dan PMA		Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA	1.464.164.077. 573	1.828.240.263. 163	2.212.484.754 .764	2.628.749.620 .665	1.464.164.077.5 73	1.828.240.263 .163	3.369.712.483 .418	3.079.703.225 .391	

		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun			1 Ranperda				1 Ranperda		
			Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi								100 orang	
			Jumlah Dokumen RUPM yang disusun	1 dokumen				1 dokumen				
		Terimplementasikannya SPIPISE	Jumlah laporan pengelolaan SIPID, SPIPISE dan Website kantor	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen			
			Updating Data SIPID dan SPIPISE			12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Jumlah Laporan Fasilitasi Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal								1 Laporan	
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		Jumlah Penyerahan Ijin	4000 ijin	4100 ijin	4200 ijin	4200 ijin	4000 ijin	4100 ijin	6088 ijin	4200 ijin	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1300 orang	1100 orang	1300 orang	1350 orang	1300 orang	1100 orang	2252 Orang	1350 orang	
			Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perijinan	1 laporan	1 Laporan			1 laporan	1 Laporan			
			Laporan hasil pengelolaam teknis layanan perijinan	1 laporan	1 Laporan			1 laporan	1 Laporan			
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	1 laporan	1 Laporan			1 laporan	1 Laporan		1 Laporan	

		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat Dunia Usaha	Penyelenggaraan Sosialisasi	225 orang	150 orang	150 orang	100 Orang	225 orang	150 orang	150 orang	150 orang	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perijinan	40 orang	45 orang			40 orang	45 orang		57 Orang	
			Jumlah Aplikasi PTSP yang diadakan	1 paket	1 paket			1 paket	1 paket		1 Paket	
			Jumlah Aplikasi yang dipelihara			1 paket				1 paket	1 paket	
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat Dunia Usaha	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perijinan				2 Peraturan Bupati					
			Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	9 unit	9 unit	10 unit	9 unit	9 unit	9 unit	10 unit	10 unit	
			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln				12 bln				
			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	

			Waktu pengelolaan keuangan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah kendaraan dinas yang diadakan								5 unit	
			Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	3 unit	2 unit		9 unit	3 unit	2 unit			
			Jumlah peralatan kantor yang diadakan	8 unit	2 unit	11 Unit		8 unit	2 unit	11 Unit	4 Unit	
			Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	3 unit	12 unit		11 unit	3 unit	12 unit	1 Unit		
			Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	1 Unit	1 unit	
			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 unit	10 unit	10 unit	9 unit	9 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	-	10 unit	10 unit	10 unit	-	10 unit	10 unit	16 unit	
			Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	-	20 unit	20 unit	20 unit	-	20 unit	20 unit	22 unit	
			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit				1 unit				
			Jumlah Instalasi Air/ Listrik yang diadakan			1 unit	1 unit			1 unit		
			Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan			1 unit				1 unit		
			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	45 org		50 orang	30 orang	45 org		50 orang		

			Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan		48 orang		27 Orang		48 orang		50 orang	
			Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal								2 orang	
			Waktu penyelenggaraan bimtek	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Jumlah Renstra dan Lakip yang disusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	
			Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	
			Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara	1 paket				1 paket				
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		4 Dok	7 dok	8 dok		4 Dok	7 dok	7 dok	

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan Pembangunan Daerah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dan beberapa prioritas lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM di bidang Penanaman Modal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan pencapaian target Indikator SPM di Bidang Penanaman Modal, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan Renja tahun 2017 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi Penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal.
2. Monitoring dan Evaluasi atas implementasi SPM bidang Penanaman Modal.

Selain itu, beberapa kegiatan di bidang Penanaman Modal yang harus diselenggarakan dalam penyusunan Renja SKPD adalah

1. Penyelesaian penyusunan RUPMK.
2. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah
3. Penyelenggaraan PTSP
4. Penyelenggaraan Marketing Investasi Indonesia.
5. Implementasi sistem pelayanan informasidan perijinan investasi secara elektronik.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan berdasarkan kebutuhan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai dengan prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pasal 99 ayat 2 menyebutkan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Tabel Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017, sebagai berikut :

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017

1 0 2	0 9 5	1 5	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA	Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA					2.628.749.620.665	2.628.749.620.665	71.745.000	84.995.000	13.250.000	APBD II	APBD II		101.396.000	a	
1 0 2	0 9 5	1 5	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	Updating Data SIPID dan SPIPISE	Updating Data SIPID dan SPIPISE	Peluang Investasi dan Potensi Unggulan	Peluang Investasi dan Potensi Unggulan	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bulan	12 bulan	41.075.000	54.325.000	13.250.000	APBD II	APBD II	12 bulan	62.716.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	1 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan					12 bulan	12 bulan	30.670.000	30.670.000	-	APBD II	APBD II	12 bulan	38.680.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	1 5	Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik	Jumlah Penyerahan Ijin	Jumlah Penyerahan Ijin					4200 ijin	4200 ijin	499.142.000	501.932.000	2.790.000	APBD II	APBD II		610.617.000	a	
1 0 2	0 9 5	1 5	Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	Penanaman Modal/ Pengurus Izin Usaha	Penanaman Modal/ Pengurus Izin Usaha	DPMP TSP	DPMP TSP	1350 orang	1350 orang	373.545.000	361.805.000	(11.740.000)	APBD II	APBD II	1350 orang	464.685.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	1 5	Layanan Pengaduan Masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penanaman Modal/ Pengurus Izin Usaha	Penanaman Modal/ Pengurus Izin Usaha	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	100%	100%	36.297.000	35.597.000	(700.000)	APBD II	APBD II	100%	45.932.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	1 5	Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	Penanaman Modal/ Pengurus Izin Usaha	Penanaman Modal/ Pengurus Izin Usaha	Kab. Sinjai	Kec. Sinjai Barat, Kec. Pulau IX,	1 Kali	3 kali/ 3 Kecamatan	73.042.000	89.222.000	16.180.000	APBD II	APBD II	9 Kali	100.000.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	1 5	Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan perizinan	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan perizinan	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	DPMP TSP	DPMP TSP	2 Perbup	2 Perbup	16.258.000	15.308.000	(950.000)	APBD II	APBD II				DPMPT SP

1 0 2	0 9	1 5	1 5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)					100%	100%	502.193.000	565.973.000	63.780.000	APBD II	APBD II		1.486.470.000	a	
1 0 2	0 9	1 5	1 9	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bln	12 bln	74.520.000	74.520.000	-	APBD II	APBD II	12 bln	74.520.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	2 0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	9 unit	9 unit	1.300.000	2.100.000	800.000	APBD II	APBD II	9 unit	2.100.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	2 2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Gedung Kantor	Gedung Kantor	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bln	12 bln	6.500.000	6.500.000	-	APBD II	APBD II	12 bln	6.100.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Gedung Kantor	Gedung Kantor	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bln	12 bln	5.000.000	5.000.000	-			12 bln	875.945.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	0 7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bln/2 koran	12 bln/2 koran	2.400.000	2.400.000	-	APBD II	APBD II	12 bln	3.600.000	a	DPMPT SP

1 0 2	0 9	1 5	0 7	Pelayanan administrasi kesekretariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	PNS	PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bln	12 bln	157.665.000	151.985.000	(5.680.000)	APBD II	APBD II	12 bln	159.045.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	2 2	Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan daerah	Waktu pengelolaan keuangan daerah	PNS	PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	12 bln	12 bln	63.177.000	60.837.000	(2.340.000)	APBD II	APBD II	12 bln	65.160.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	2 4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kabupaten Sinjai, Dalam Provinsi, Luar Provinsi	Kabupaten Sinjai, Dalam Provinsi, Luar Provinsi	12 bln	12 bln	191.631.000	262.631.000	71.000.000	APBD II	APBD II	12 bln	300.000.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	2 6	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi					100%	100%	212.000.000	221.000.000	9.000.000	APBD II	APBD II	100%	348.140.000	a	
1 0 2	0 9	1 5		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	9 unit	9 unit	86.000.000	86.000.000	-			5 Unit	86.000.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	0 2	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang diadakan		PNS dan Non PNS		DPMP TSP		3 Unit		9.000.000	9.000.000	APBD II	APBD II	18 Unit	118.750.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5		Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	Mebeleur Kantor	PNS dan Non PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	11 unit	11 unit	26.200.000	26.200.000	-	APBD II	APBD II	22 unit	65.250.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9	1 5	0 3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	PNS	PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	9 unit	9 unit	42.500.000	42.500.000	-	APBD II	APBD II	9 unit	42.500.000	a	DPMPT SP

1 0 2	0 9 5	1 5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	DPMP TSP	DPMP TSP	10 unit	10 unit	3.500.000	3.500.000	-			15 Unit	10.860.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	0 1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	DPMP TSP	DPMP TSP	20 unit	20 unit	8.800.000	8.800.000	-	APBD II	APBD II	40 Unit	24.780.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	0 4	Pengadaan Instalasi Listrik	Jumlah Instalasi Listrik Yang diadakan	Jumlah Instalasi Listrik Yang diadakan	Aparatur	Aparatur	DPMP TSP	DPMP TSP	1 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	-	APBD II	APBD II			a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	0 9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan					100%	100%	26.220.000	25.300.000	(920.000)	APBD II	APBD II	100%	36.000.000	a	
1 0 2	0 9 5		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	PNS	PNS	DPMP TSP	DPMP TSP	30 orang	30 orang	13.800.000	12.880.000	(920.000)		APBD II	7 Pasang	14.000.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5	0 7	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang diadakan	Petugas PTSP	Petugas PTSP	DPMP TSP	DPMP TSP	27 Orang	27 Orang	12.420.000	12.420.000	-	APBD II	APBD II	55 Pasang	22.000.000	a	DPMPT SP
1 0 2	0 9 5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas					100%	100%	50.000.000	51.400.000	1.400.000			100%	120.000.000	a	
1 0 2	0 9 5	0 7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan bimtek	Waktu penyelenggaraan bimtek	PNS	Luar Daerah	PNS	Dalam dan Luar Daerah	12 bln	12 bln	50.000.000	51.400.000	1.400.000	DAU/DAK		12 bln	120.000.000	a	DPMPT SP

1 0 2	0 9	1 5	0 8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD					100%	100%	43.926.000	44.876.000	950.000	DAU/DAK		100%	36.823.000	a	
1 0 2	0 9	1 5		Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra dan Lakip yang disusun	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	LKj SKPD	LKj OPD	DPMP TSP	DPMP TSP	1 laporan	1 laporan	2.953.000	2.953.000	-			1 laporan	4.173.000	a	DPMPTSP
1 0 2	0 9	1 5	0 1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan OPD	DPMP TSP	DPMP TSP	1 Laporan	1 Laporan	7.378.000	8.328.000	950.000	APBD II	APBD II			a	DPMPTSP
1 0 2	0 9	1 5		Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen SKPD	Dokumen Perencanaan OPD	DPMP TSP	DPMP TSP	8 Dokumen	8 Dokumen	33.595.000	33.595.000	-			7 Dokumen	32.650.000	a	DPMPTSP
JUMLAH													1.630.160.000	1.790.410.000	160.250.000				1.673.563.000		

Dari matriks Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 diatas dapat diketahui bahwa ada pergeseran dan penambahan Pagu Anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

P E N U T U P

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013-2018. Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 harus menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam suatu instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.